

Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Pesantren



Teuku Kemal Fasya. Foto : Bustami Ibrahim

Teuku Kemal Fasya

Kamis, 7 Juli 2022, beberapa media televisi nasional melakukan siaran langsung *breaking news* tentang upaya penangkapan, Moch Subchi Azal Tzani (MSAT), anak pemimpin pesantren Shiddiqiyah, Ploso, Jombang.

Kisah penangkapannya seperti sebuah *dramathriller*. Setelah beberapa kali gagal, kisah pelaku cabul yang telah menjadi tersangka sejak 2019 itu berhasil di ditangkap oleh tim Polda Jawa Timur menjelang tengah malam.

Relasi kuasa

Apa yang bisa dibaca dari kasus MSAT ini membuktikan bagaimana relasi kuasa, baik dari posisi pesantren sebagai salah satu poros kekuasaan keagamaan di dalam masyarakat maupun relasi pimpinan/kiai dan santri begitu sempurna menguncup. Dalam perspektif Gramscian, relasi kuasa itu membentuk pengetahuan hegemonik yang kemudian menjadi politik budaya dominatif.

Posisi pesantren sendiri di dalam masyarakat seperti Jombang atau Jawa Timur secara umum sedemikian signifikan. Seperti diketahui, Jombang adalah salah satu lumbung pesantren di Jawa Timur. Sedikitnya ada 120 pesantren telah terdaftar di daerah leluhur Nahdlatul Ulama itu.

Memang posisi pesantren sebagai salah satu *historical block* di dalam masyarakat Jawa telah dicatat dalam konsep trikotomi antropolog Clifford Geertz (1960). Santri menurut Geertz berelasi secara interaktif dan konvergentif dengan struktur kuasa lainnya, yaitu priyayi. Di samping tentu saja kaum abangan yang paling lemah posisi politiknya. Dalam setiap momentum elektoral, para calon kepala daerah atau caleg kerap sowan ke para kiai untuk mencari restu sebelum bertarung secara demokratis para pileg atau pilkada.

Secara politik, relasi kuasa pesantren Shiddiqiyah dengan aparat kepolisian sangat kontras. Kasus pemberkasan hukumnya telah P-21 sejak 2019, tapi tak kunjung bisa dieksekusi. Hingga tiga kali pergantian Kapolda Jawa Timur “kasus kecil” ini tidak berhasil dituntaskan. Kasus ini sendiri menunjukkan relasi sosial-politik yang antara pimpinan pesantren dengan kepolisian yang seharusnya independen, imparial, dan tegak lurus dalam menanggapi kasus hukum. Malah sebaliknya, memperlihatkan disfungsi peran pemolisian masyarakat. Aksi Polisi 7 Juli itu berhasil karena dukungan luas dari peliputan pelbagai media massa.

Struktur relasi yang dominatif selanjutnya adalah antara kiai dan santri. Hubungan ketaatan santri terhadap kiai, dan juga terhadap keturunannya yang disebut “gus” juga cukup besar. Para “gus” ini biasa memanggil para santri lebih tua langsung dengan nama. Meskipun “gus” memiliki pertalian genealogis dengan kiai, ia harus menunjukkan kedalaman ilmu dan dukungan kesalehannya secara sosial. Beberapa anak kiai yang memiliki “cacat”, tidak dipanggil “gus”, tapi “mas” seperti kasus MSAT.

Meskipun telah berada di era pendidikan modern dan konsep merdeka belajar sedemikian berkibar, tidak demikian di dunia pesantren. Para kiai dan pimpinan pesantren dianggap bukan semata guru agama, tetapi juga sumber spiritualitas dan standar moral. Apa yang dikatakan kiai menjadi kebenaran yang perlu disikapi dan ditindaklanjuti.

Salah satu yang membuat penangkapan ini menjadi rumit adalah posisi orang tua MSAT, yaitu sang pemimpin pesantren, KH Muhammad Mukhtar yang menunjukkan pembangkangannya terhadap polisi. Ucapannya bahwa kasus ini adalah “fitnah terhadap anaknya” dan “harus diselesaikan secara kekeluargaan” telah diyakini oleh para santri, sehingga rela melawan termasuk kepada pihak kepolisian. Wacana sang kiai itu - dalam konsep Foucauldian - bertransformasi menjadi pengetahuan dan menggerakkan kekuasaan. Meskipun Kemenang telah mencabut izin pendidikan pesantren Shiddiqiyah itu, hal itu juga tidak mudah bagi masyarakat meninggalkannya.

Tanggal: 17 July 2022

Post by: [kemal](#)

Kategori: [Repository Media](#), [Artikel Opini](#),

Tags: [Riset](#), [Media Massa](#),